

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pendidikan dan pelatihan ialah metode menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk lebih mengembangkan kapasitas”¹. Pelatihan diartikan sebagai rencana sistematis guna memodifikasi ataupun meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta perilaku, melalui pengalaman belajar, yang akhirnya bisa memperoleh kinerja secara tepat². Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan pelatihan ialah landasan iklim dimana sumber daya manusia (SDM) mendapatkan ataupun menekuni perilaku, keahlian, kecakapan, kemahiran serta sikap yang berpautan dengan pekerjaan mereka.

Selain pendidikan formal sebagai manusia kita membutuhkan pendidikan nonformal dan informal pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan bahwa kemampuan pengajaran non-formal untuk menumbuhkan kapasitas siswa yang sebenarnya dengan penekanan pada dominasi informasi dan kemampuan yang berguna serta ekspansi sikap dan personalitas professional dalam Undang-Undang 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 2³. Selanjutnya pada ayat 4 diterangkan bahwa satuan pendidikan non formal ini terdiri atas sebagai berikut, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan lainnya yang sejenis. Pelatihan ini dibentuk untuk masyarakat untuk memajukan diri, mengoptimalkan profesi serta usaha mandiri.

Seperti Undang-Undang yang menjelaskan tentang sistem Pendidikan nasional. Pendidikan dan pelatihan ialah salah satu satuan pendidikan non formal. Pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut

¹ PP No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Pasal 1 ayat (1)

² Garavan, Thomas N., Pat Costine, and Noreen Heraty. (1997). “Training and Development: Concepts, Attitudes, and Issues”. Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA, hal.2.

³ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (2)

dengan diklat dapat dikategorikan sebagai layanan jasa. Jasa yaitu suatu aktivitas maupun manfaat yang akan diberikan oleh salah satu kelompok kepada kelompok lainnya berupa tidak berwujud atau tidak berbentuk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikannya. Produk tidak nyata ini yang didapatkan oleh peserta diklat dan hasilnya merupakan ilmu yang dapat digunakan pada aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu proses metamorfosis seseorang dari tidak terlatih menjadi sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berupaya menjalankan tanggung jawab baru dengan diberikannya pembelajaran.

Dalam proses pembelajarannya diklat ini menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa. Oleh karena itu penerapan prinsip ini sangat terlihat pada diklat yang ada. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa orang dewasa mau belajar jika ia membutuhkannya. Pada diklat memiliki proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik, pengajar, serta penyelenggara diklat seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Setiap organisasi tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai sebuah program yang bermanfaat bagi yang membutuhkan untuk pekerjaannya. Salah satunya dengan membuat program peningkatan SDM melalui pusat pendidikan dan pelatihan, peningkatan SDM yang dimaksudkan sesuai visi dan misi lembaga. Pengembangan SDM diyakini mampu menambah upaya untuk mengatasi permasalahan di dunia kerja. Penurunan dalam kinerja dan efisiensi tampak bukan sekedar level individu, namun lebih terjadi pada tingkat pekerjaannya.

Pusdiklat Perpusnas RI adalah salah satu tempat yang menjadi penyelenggara diklat. Pada pusdiklat ini melaksanakan pembelajaran dengan diklat yang dapat di ikuti dari berbagai kalangan orang dewasa dan daerah. Kebutuhan akan pembelajaran yang diberikan melalui Pusdiklat Perpusnas RI yang bermutu sangat meningkat dengan seiring kebutuhan diklat yang semakin tinggi. Pusdiklat ini sudah menjalani banyak diklat dengan berbagai jenis diklat yang diantaranya pelatihan teknis dan fungsional. Diklat yang berada dipusdiklat ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan instansi terkait dan pihak yang terlibat lainnya. Penyelenggaraan

diklat dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lainnya.

Salah satu diklat yang dilaksanakan pada pusdiklat ini adalah diklat kepala perpustakaan sekolah. Latar belakang diadakannya diklat ini diantaranya untuk mencapai kepentingan tenaga perpustakaan sekolah sebagai penerapan Undang-Undang No.43/2007 terkait perpustakaan. Kemudian Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI yaitu Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah untuk kepala perpustakaan sekolah, dan dalam rangka menjejaki perkembangan teknologi informasi di dunia perpustakaan. Diklat kepala perpustakaan sekolah ini merupakan implementasi Undang-Undang No.43/2007 terkait Perpustakaan, Undang-Undang No.20/2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendiknas No.25/2008 terkait Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah agar para *stakeholder* di segi Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah dapat: memiliki keahlian, tingkah laku, dan kapabilitas berkaitan dengan Undang-Undang No.43/2007 terkait Perpustakaan dan Permendiknas No.25/2008 terkait penyangga Kapabilitas dan Kecakapan Kepala/Tenaga Perpustakaan Sekolah/madrasah.

Sasaran dari diklat ini ialah kepala/calon kepala perpustakaan sekolah yang notabennya adalah orang dewasa. Peserta diklat terdiri atas perempuan dan laki-laki dengan membidangkan usia 20-60 tahun. Artinya, diklat ini untuk orang dewasa. Sementara itu, Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah memiliki beberapa mata ajar dengan total jam pelatihan 120 dan 1 jam pelatihan setara dengan 45 menit.

Diklat ini dilakukan setiap tahunnya dengan 1 tahun memiliki beberapa angkatan. Diselenggarakannya Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pada kepala/calon perpustakaan sekolah. Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah (KPS) ini dijalankan dengan cara *blended learning* memiliki 4 angkatan. Diselenggarakannya diklat secara daring dan klasikal ini memanfaatkan portal *E-learning* Diklat Kepustakawanan (ELDIKA) dengan alamat web : <http://eldika.perpusnas.go.id> dan *Zoom Meeting*. Adapun paparan mata ajar Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah (KPS) sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Mata Ajar Diklat

No.	Mata Ajar	JP
1.	Manajemen Strategis Pengembangan Perpustakaan Sekolah	6
2.	Wawasan Pendidikan	6
3.	Kepemimpinan dan Kewirausahaan (<i>Entrepreneurship</i>) Bidang Perpustakaan	8
4.	Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah	8
5.	Pengorganisasian Informasi	14
6.	Layanan, Jasa dan Sumber Informasi	6
7.	Teknologi Informasi untuk Perpustakaan Sekolah	6
8.	Manajemen Pemasaran Perpustakaan Sekolah	6
9.	Literasi Informasi	6
10.	Komunikasi Interpersonal	6
11.	Pelestarian Bahan Perpustakaan	6
12.	Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	6
13.	Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	6
14.	Praktik Kerja Perpustakaan Sekolah	12
15.	Studi Banding Perpustakaan	8
16.	Seminar Pengelolaan Perpustakaan sekolah	6
17.	Evaluasi	4
Jumlah Total Jam Pelatihan		120

Sumber. Kurikulum Dan Garis – Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) yang digunakan Pendidikan Dan Pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah

Pada paragraf sebelumnya sudah menyinggung bahwa Pusdiklat Perpunas RI merupakan lembaga yang ada dalam bidang peningkatan kualitas SDM khususnya untuk pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan. Peserta diklat merupakan salah satu pilar yang penting untuk kesuksesan diklat. Mereka yang merasakan langsung manfaat dengan diadakan diklat. Diklat yang sangat dirasakan manfaatnya oleh peserta diklat. Dengan itu, pusat Pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional

republik Indonesia perlu menghasilkan pembelajaran yang terbaik supaya menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan peserta sehingga dapat menghasilkan reaksi dihati peserta. Pembelajaran ini dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta diklat.

Pada realitanya masih terdapat kritik dan saran terhadap penyelenggaraan diklat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kurangnya durasi pada saat sesi diskusi menjadi saran agar lebih baik lagi. Terlebih diklat kepala perpustakaan sekolah ini diadakan secara *Asynchronous* dan *Synchronous*. Hal tersebut didasarkan pada keluhan peserta diklat yang disampaikan kepada Pusdiklat Perpusnas RI seperti: waktu sesi tanya jawab yang kurang, kurang jelas penyampaian perihal forum diskusi, metode pembelajaran yang kurang variatif membuat komunikasi dua arah yang kurang aktif, peserta merasa kurang memahami isi materi yang tidak disampaikan secara optimal. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan internal dan eksternal yang memungkinkan untuk menjadi kendala terhadap perkembangan pusat pendidikan dan pelatihan pada nantinya, sehingga dibutuhkan perbaikan kualitas pembelajaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai penyelenggara.

Dalam rangkaian pelaksanaan diklat, salah satu rangkaian yang perlu dilaksanakan merupakan evaluasi. Pelaksanaan pelatihan tidak serta merta berakhir dengan selesainya kegiatan pelatihan. Beberapa permasalahan dapat diidentifikasi setelah berakhirnya kegiatan pelatihan. Sekiranya saja bagaimana, sifat dari program pelatihan dan apakah peserta diklat senang dengan program pelatihan yang baru saja selesai atau apakah ada hal-hal yang sebenarnya perlu diperbaiki atau perlu diperbaiki sehubungan dengan sifat persiapan pelaksanaannya. Semua pertanyaan di atas dapat dijawab jika koordinator pelatihan melakukan penilaian mengenai program pelatihan. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang objektif dan seakurat mungkin mengenai suatu program

yang telah dilaksanakan.⁴ Evaluasi reaksi yang dilakukan oleh Pusdiklat Perpunas RI ini masih minim sehingga belum dapat mengetahui respon apa yang diberikan peserta pada penyelenggaraan diklat KPS. Oleh karena itu, esensial untuk melakukan penelitian ini sebagai bahan evaluasi reaksi atas penyelenggaraan diklat yang diberikan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI agar memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan Penyelenggara. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk merekomendasikan perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran, agar puas dengan pembelajaran yang diberikan dengan Pusdiklat Perpunas RI sebagai penyelenggara diklat.

Guna melaksanakan penelitian ini digunakan model evaluasi Kirkpatrick (*Kirkpatrick four Evaluation Models*). Penerapan model evaluasi ini dilandaskan pada kesederhanaan, integritas, transparansi dan keringanan dalam mengimplementasikan model ini. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick mencakup 4 level evaluasi, yaitu level 1 *reaction*, level 2 *learning*, level 3 *behavior*, level 4 *result*. Pada level 1 *reaction*, evaluasi ini dilakukan mengenai reaksi peserta pelatihan yang bermaksud untuk menaksir kepuasan peserta (*customer satisfaction*).⁵ Suatu program pelatihan dikatakan menarik jika interaksi pelatihan dianggap menyenangkan dan memuaskan bagi peserta, sehingga menggerakkan mereka untuk belajar dan berlatih, terutama karena peserta diklat dapat mengatasi permasalahan mereka.⁶ Berikut adalah beberapa landasan penting untuk mengevaluasi respons dalam pelatihan, khususnya untuk memberikan kontribusi penting kepada penyelenggara diklat dalam mengembangkan lebih lanjut program pembelajaran dan peningkatan SDM, memberikan gagasan dan kontribusi kepada pendidik sehubungan dengan tingkat kelayakan mereka dalam mengajar, dapat memberikan data kuantitatif kepada pimpinan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pilihan untuk memberikan data

⁴ Kirkpatrick, D. L. 1998. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

⁵ Donald L. Kirkpatrick and James D. Kirkpatrick. 2007. *Implementing The Four levels* (San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc). h. 24.

⁶ Widoyoko, E. P. *Evaluasi Program Pelatihan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h.169.

kuantitatif kepada pengajar yang dapat dijadikan alasan untuk ikut serta dalam menunjukkan prinsip di kemudian hari.

Pada pembelajaran yang dilakukan pada diklat Kepala Perpustakaan Sekolah ini secara klasikal dan daring. Hal tersebut untuk metode ajar yang tidak hanya di dalam kelas secara tatap muka saja. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Pusdiklat Perpustakaan RI) mengadakan diklat tersebut dengan menggunakan metode *blended learning*. *Blended Learning* pada dasarnya merupakan perpaduan pembelajaran yang mengandung unsur campuran atau gabungan keistimewaan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan *online*. Istilah lain dari *Blended Learning* yaitu *hybrid learning* dan *mixed mode learning*.⁷

Pusat Pendidikan dan Pelatihan ini menggunakan *Zoom Meeting*. Pada diklat yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan *Asynchronous* dan *Synchronous*. *Asynchronous* dilakukan dengan menggunakan LMS yang difasilitasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI. LMS tersebut menjadi cara yang digunakan untuk pembelajaran yang waktunya fleksibel dan belajar mandiri jika peserta ingin mengulang pembelajaran yang sudah berlangsung. Sedangkan *Synchronous* yang dilaksanakan dalam pembelajaran pada diklat Kepala Perpustakaan Sekolah adalah dilakukan dengan *Zoom Meeting* dan pembelajaran secara langsung atau klasikal di Hotel Arcadia, Jakarta Pusat.

Walaupun demikian, pembelajaran dengan cara *blended learning* ini menimbulkan masalah yang membuat peserta didik memberikan kritik dan saran pada penyelenggaraan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Waktu pembelajaran yang kurang bagi peserta diklat, pelaksanaan praktik diharapkan lebih lama lagi pada saat pembelajaran klasikal, serta modul yang disarankan untuk disajikan per-materi merupakan kritik dan saran yang diberikan oleh peserta diklat. Dalam menjalankan tugasnya pihak penyelenggara diklat ini hanya memiliki 7 orang dan pihak evaluasi terdapat 6 orang.

⁷ Husamah, Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*), (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2014), h.11

Mengingat landasan yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik meneliti terkait evaluasi reaksi diklat kepala perpustakaan sekolah pada Pusdiklat Perpusnas RI. Oleh karena itu, penelitian akan dilakukan dengan diberikan judul **“Reaksi Peserta pada Penyelenggaraan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional (Studi Deskriptif pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI)”**

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, identifikasi permasalahan penelitian dapat dikenali sebagai berikut :

1. Terdapat kritik yang diberikan peserta yang dapat mempengaruhi reaksi peserta terhadap penyelenggaraan diklat.
2. Kurangnya waktu sesi tanya jawab membuat peserta mengeluhkan hal tersebut.
3. Pada saat forum diskusi penyampaian pengajar kurang jelas.
4. Metode pembelajaran yang kurang variatif membuat komunikasi dua arah yang kurang aktif.
5. Peserta merasa kurang memahami isi materi yang tidak disampaikan secara optimal.
6. Evaluasi reaksi yang dilakukan oleh Pusdiklat Perpusnas RI ini masih minim.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini digunakan untuk menghindari adanya pelebaran ataupun menyimpangan dari pokok bahasan. Adanya batasan ini agar penelitian lebih terarah dan mempermudah tercapainya tujuan dari penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya kepada evaluasi reaksi peserta terhadap penyelenggaraan diklat kepala perpustakaan sekolah pada pusat pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional RI, evaluasi reaksi ini menggunakan model evaluasi Kirkpatrick pada level 1 reaksi yang meliputi diklat, konten, pengajar/widyaiswara, dan relevansi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, oleh

karena itu, peneliti dapat merumuskan masalah utama dan umum dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Reaksi Peserta Terhadap Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi reaksi peserta atas penyelenggaraan diklat yang diberikan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI agar memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan Penyelenggara.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Pemanfaatan penelitian ini sebagai salah satu syarat guna gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dan menyelesaikan studi pada program pendidikan sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Secara teoritis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan data yang lebih banyak tentang reaksi peserta diklat terhadap pelaksanaan diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI pada diklat Kepala Perpustakaan Sekolah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI

Hasil penelitian ini dapat memberikan data positif terkait reaksi peserta diklat terhadap Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI pada diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penyelenggaraan diklat Kepala Perpustakaan Sekolah pada Pusdiklat Perpusnas RI.

b. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Memperkaya temuan penelitian terkait dengan dengan reaksi peserta dan evaluasi yang telah dibuat oleh instansi terkait masalah

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif atau rekomendasi kepada instansi agar memberikan pengetahuan untuk memajukan kualitas penyelenggaraan diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI.

c. Bagi Peneliti lain

Tentu saja masih terdapat aspek yang masih dapat dieksplorasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini tersedia bagi peneliti yang berbeda untuk menyelesaikan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.

